



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025

KECAMATAN MUARA BADAK



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Muara Badak Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.



Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Muara Badak Semoga LKjIP Kecamatan Muara Badak ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.



Muara Badak, 24 Februari 2026
Camat Muara Badak

ARPAN, S.Sos

Ni. 196806121988031007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025		PROSENTASE
				TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	80	100	125
		Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	78	100	128
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	35	47.09	135



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

--	--	--	--	--	--	--

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	5
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	6
	E. Sumber Daya Aparatur	7
	F. Sumber Daya Keuangan	10
	G. Isu-Isu Strategis	10
	H. Sistematika Laporan Kinerja	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	12
	A. Perencanaan Kinerja	12
	1 Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	12
	2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	14
	3 Strategi dan Arah Kebijakan	15
	4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
	B. Perjanjian Kinerja	20
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2025	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	29
	A. Capaian Kinerja	29
	1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	31
	2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	37
	3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Muara Badak (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi	40



	Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional	
	Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Analisis Efisiensi	
4	Penggunaan Anggaran Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	49
	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi	42
6	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	44
	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	46
B	Realisasi Anggaran	47
BAB IV	PENUTUP	51
A	Kesimpulan dan saran	51



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan Kecamatan Muara Badak	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Badak Tahun 2025.....	4
Tabel 1.3	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Badak	5
Tabel 1.4	PNS berdasarkan Pendidikan	7
Tabel 1.5	PNS berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.6	PNS berdasarkan Eselon	8
Tabel 1.7	PNS berdasarkan Jabatan	9
Tabel 1.8	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	13
Tabel 1.9	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara BadakTahun 2021-2026.....	14
Tabel 2.0	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Badak	15
Tabel 2.1	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025.....	21
Tabel 2.3	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dengan Data Tahun 2024 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	22
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025.....	23
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025.....	24
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025	24
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	24
Tabel 2.8	Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	31
Tabel 2.9	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	32
Tabel 3.0	Realisasi Indikator Sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	34
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Sasaran Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025	35
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	38
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	38
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	40



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

Tabel 3.5	Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	43
Tabel 3.6	Rincian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Tahun 2025.....	45
Tabel 3.7	Analisis Program /Kegiatan Pencapaian Pernyataan Kinerja 2025	46
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik.1.1	Persentase Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Badak	4
Grafik.1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Badak Tahun 2025	5
Grafik.1.3	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan	7
Grafik.1.4	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	
Grafik.1.5	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Eselon	8
Grafik.1.6	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jabatan	9
Grafik.1.7	Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Muara badak Dengan Kecamatan Lain Tahun 2025	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Muara Badak dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2025; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Muara Badak Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja



dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Badak
2. Mendorong Kecamatan Muara Badak di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Badak untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan

Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

[illegible]

Dengan luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Badak sebagai berikut:

Luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Badak

No	Nama Desa	Luas Wilayah Desa (Ha)	Jumlah RT	Dusun
1	Saliki	12.928	10	2
2	Salo Palai	12.912	9	2
3	Muaara Badak Ulu	10.212	14	2
4	Muara Badak Ilir	556	14	1
5	Tanjung Limau	9.721	17	2
6	Badak Baru	1.231	30	2
7	Tanah Datar	3.964	13	2



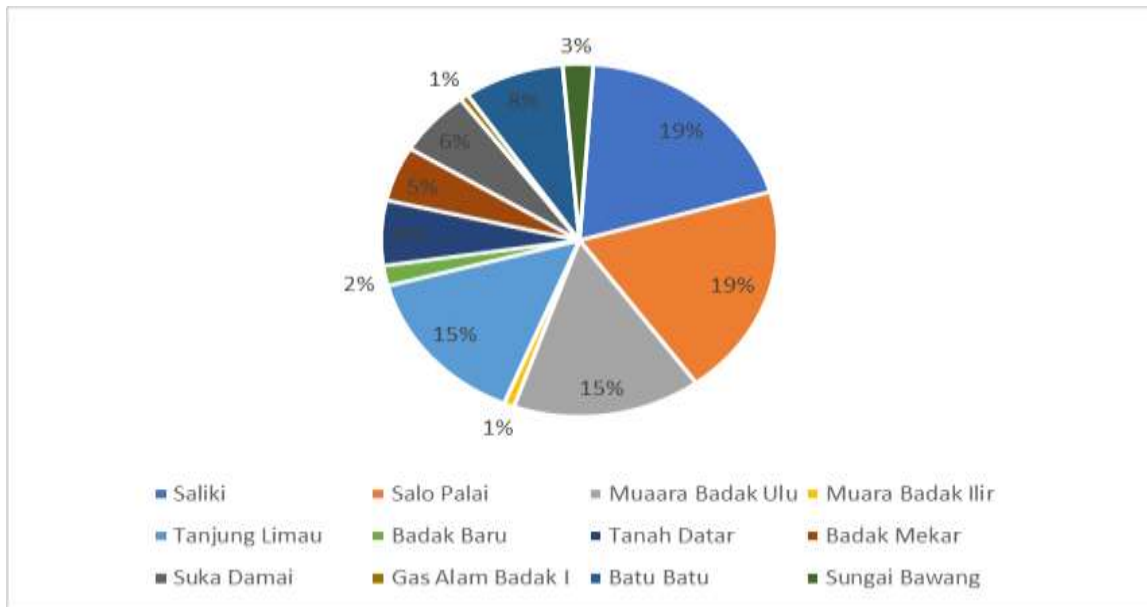
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

8	Badak Mekar	3.362	11	2
9	Suka Damai	4.023	11	2
10	Gas Alam Badak I	455	28	2
11	Batu Batu	5.439	6	1
12	Sungai Bawang	1.637	5	-
13	Salo Cella	7.197	12	3
TOTAL		63.425	180	23

Sumber Data: Pemerintahan Kecamatan Muara Badak

Grafik 1.1

Persentase Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Badak



Jumlah penduduk mencapai 52222 jiwa (data Bagian Pemerintahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2025),

Tabel 1.2.

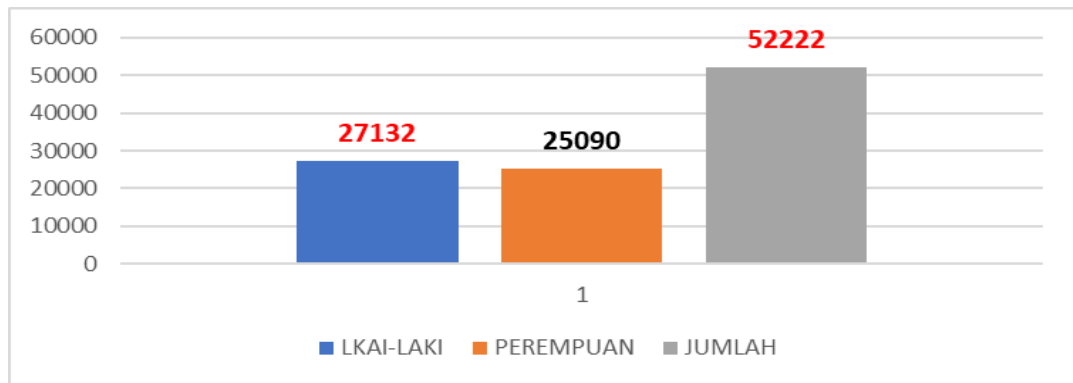
Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

NO	WILAYAH	PENDUDUK	PENDUDUK	PENDUDUK
		(LK)	(PR)	(JML)
MUARA BADAK		27132	25090	52222
1	SALIKI	2039	1840	3879
2	SALOK PALAI	1023	915	1938
3	MUARA BADAK ULU	3162	3027	6189
4	MUARA BADAK ILIR	3441	3028	6469
5	TANJUNG LIMAU	3280	3147	6427
6	TANAH DATAR	1477	1348	2825
7	BADAK BARU	5178	4895	10073
8	SUKA DAMAI	862	804	1666
9	BADAK MEKAR	657	572	1229
10	GAS ALAM BADAK I	3181	2911	6092



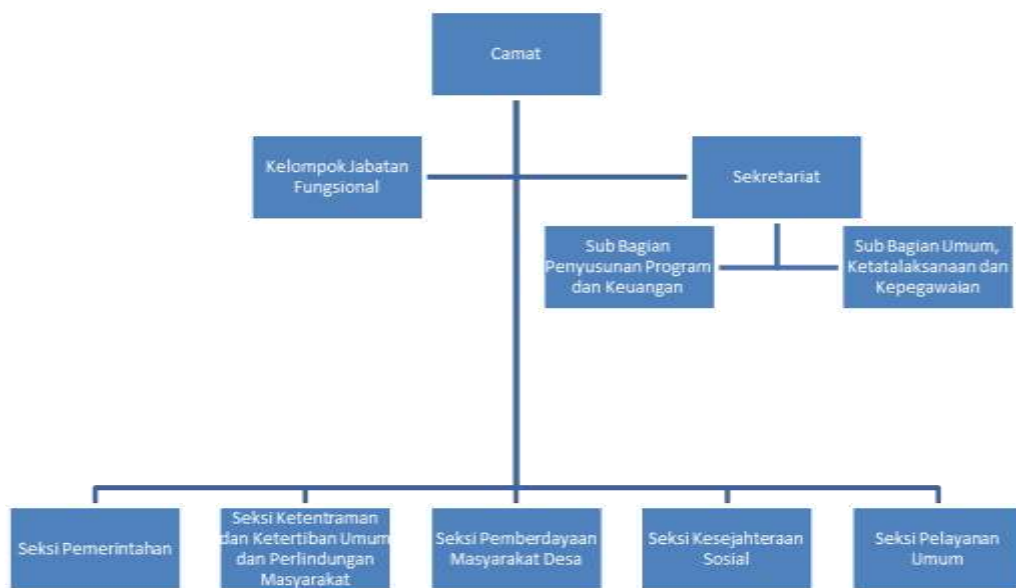
11	BATU-BATU	1273	1132	2405
12	SALLO CELA	1228	1169	2397
13	SUNGAI BAWANG	331	302	633

Grafik 1.2



C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pembentukan Kecamatan Muara Badak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan



bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;



8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2025 sebanyak 25 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

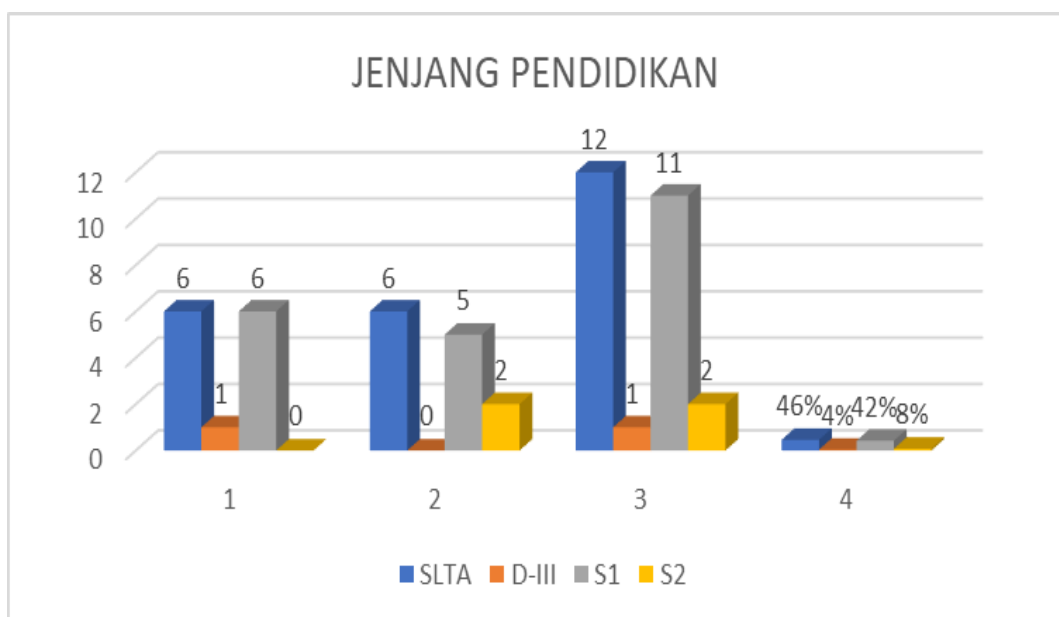
Tabel 1.4.

PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SLTA	6	6	12	46%
2	D-III	1	0	1	4%
3	S1	6	5	11	42%
4	S2	0	2	2	8%
Jumlah		13	12	26	100%

Grafik 1.3

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan





b. Berdasarkan Golongan

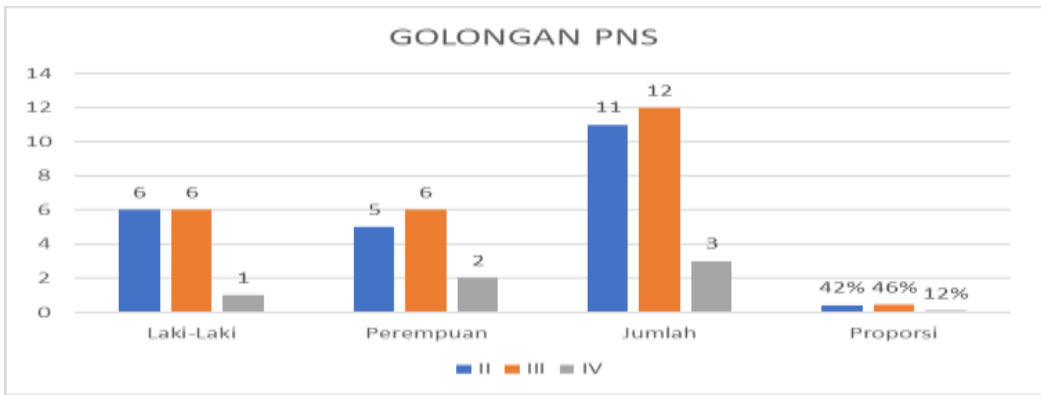
Tabel 1.5.

PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II	6	5	11	42 %
2	III	6	6	12	46 %
3	IV	1	2	3	12 %
	Jumlah	14	12	26	100 %

Grafik 1.4

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan



c. Berdasarkan Eselon

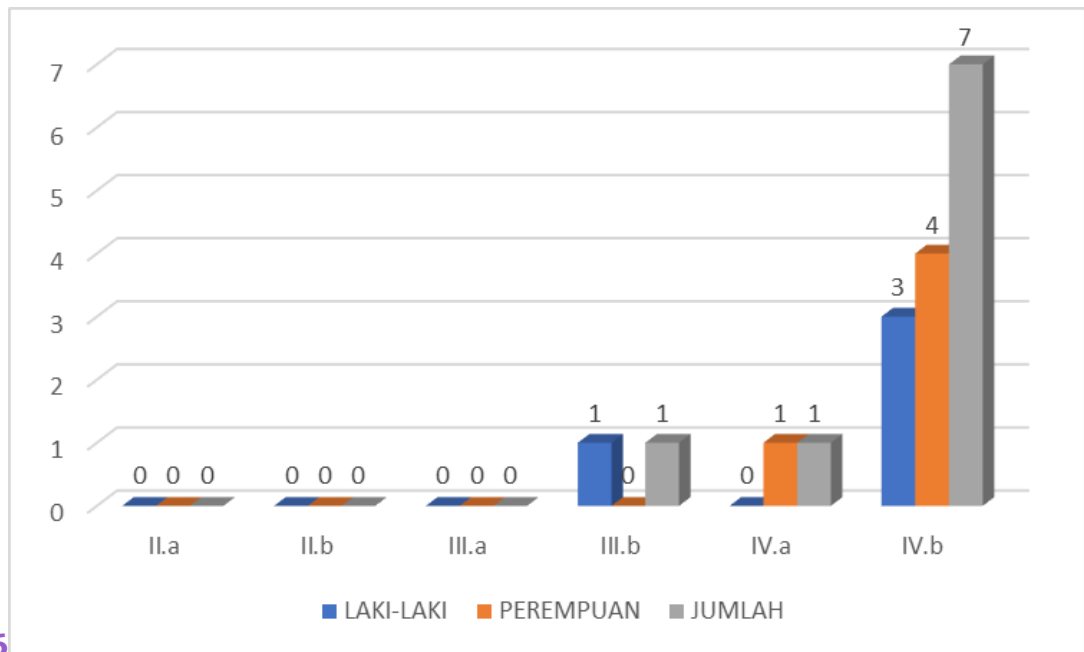
Tabel 1.6.

PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0.00%
2	II.b	0	0	0	0.00%
3	III.a	0	0	0	0.00%
4	III.b	1	0	1	11.11%
5	IV.a	0	1	1	11.11%
6	IV.b	3	4	7	77.78%
Jumlah		4	5	9	100%



Grafik 1.5



d. Berdasarkan Jenis Jabatan

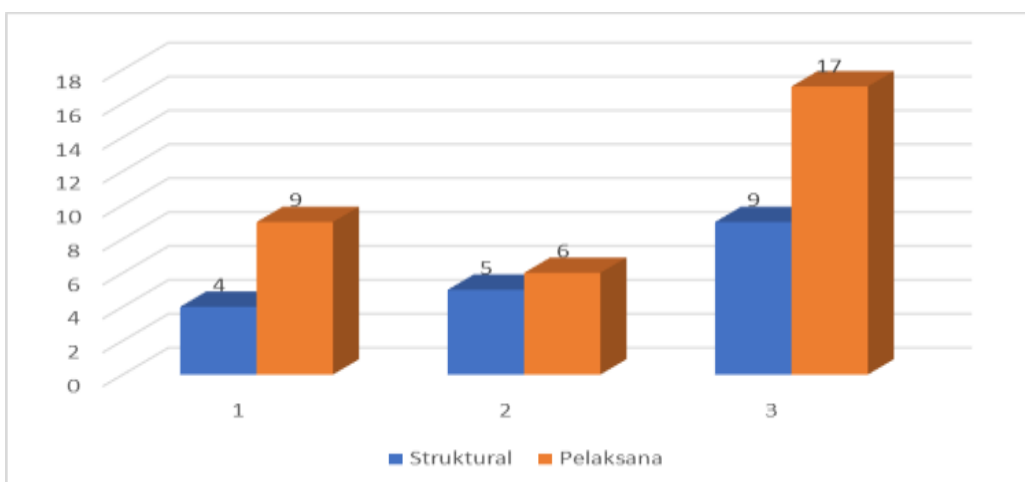
Tabel 1.7.

PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Struktural	4	5	9	36.00%
2	Pelaksana	9	7	16	64.00%
Jumlah		13	12	25	100%

Grafik 1.6

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan





F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak pada Tahun 2025 berasal dari APBD Perubahan Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Muara Badak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.355.540.485 yang diperuntukkan untuk belanja operasi dan belanja modal serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 5 (Lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 -2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, 7 (tujuh) Isu strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Dukungan persiapan pembangunan IKN
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik, cepat, mudahm murah dan bermutu
3. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Optimalisasi potensi ekonomi daerah
5. Penataan infrastruktur daerah yang terintegrasi antara spasial dan fungsional
6. Pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan
7. Percepatan pembangunan wilayah desa dan kecamatan

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Pemerintah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.



3. Meningkatkan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
4. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan layanan umum
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Muara Badak yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Muara Badak telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, Renstra perubahan ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”**.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;



6. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Kecamatan Muara Badak mengampu **Misi pertama** yang terlihat pada tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan
					Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Muara Badak berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja;



2. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indikator Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB);
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah dengan indikator Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Badak dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

b. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Badak, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut:

Tabel 1.9.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60	65	70	75	80	90
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	90	92	95	97	99	100
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	68	74	82	89	95
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persen	63	65	71	74	78	80



3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.0 berikut:

Tabel 2.0 .

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Muara Badak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan di Kecamatan
			Meningkatkan Fasilitas Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah.
			Meningkatkan Kualitas Pembangunan Jalan, Jembatan dan pemeliharaan Jalan, Jembatan di Kecamatan.
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Mebel



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

			Daerah	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan



				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara BadakTahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
A	Indikator Kinerja Utama				
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	A1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	80
		A2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	78
B	Indikator Kinerja Tambahan				
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88.30
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B4	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Nilai	3
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	B5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	B7	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B10	Indeks RB Kabupaten	Indeks	65
----	--	-----	---------------------	--------	----

Di tahun 2025 terdapat 11 (Sebelas) poin perjanjian kinerja dengan 12 (dua belas) indikator yang menjadi target Perangkat Daerah Kantor Camat Muara Badak, dimana terdiri dari 2 (empat) indikator utama dan 10 (Sepuluh) indikator tambahan.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 jika dibandingkan dengan data awal atau capaian kinerja pada tahun 2021 serta dengan target akhir dari Renstra perangkat daerah Kecamatan Muara Badak tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dengan Data Tahun 2024 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Data Awal (2021)	Target	Target Akhir Renstra 2026
A	Indikator Kinerja Utama						
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	A1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	60	75	90
		A2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	63	74	80
		A3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	28	30	40
B	Indikator Kinerja Tambahan						
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	N/a	100	N/a
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	N/a	88.30	N/a
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	N/a	100	N/a



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B4	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Nilai	N/a	3	N/a
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	B5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Persen	N/a	100	N/a
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	N/a	100	N/a
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	B7	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	N/a	100	N/a
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	N/a	48	N/a
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	N/a	77	N/a
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B10	Indeks RB Kabupaten	Indeks	N/a	65	N/a

C. Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun Anggaran 2025, Kecamatan Muara Badak melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.52.355.540.485.- Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2025 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar **Rp. 980.000.000.-**

Tabel 2.4.

Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah
Alokasi Anggaran	Rp.51.375.540.485.-	Rp.52.355.540.485.-	Rp. 980.000.000.-



1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5.

Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp. 49.600.942.986.-	Rp. 50.995.477.986.-	Rp. 1.394.535.000.-
Belanja Modal	Rp. 1.774.597.499.-	Rp. 1.760.062.499	Rp. (14.535.0000)
Total	Rp. 51.375.540.485.-	Rp. 52.355.540.485-	Rp. 980.000.000.-

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Kecamatan Muara Badak mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6.

Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Rp. 51.375.540.485.-	Rp. 52.355.540.485-	Rp. 980.000.000.-
Total	Rp. 51.375.540.485.-	Rp. 52.355.540.485-	Rp. 980.000.000

Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 merencanakan 5 (lima) program, 15 (Lima belas) kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7.

Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran sebelum Perubahan Tahun 2025	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2025	Selisih
1	3	4	5	6	7



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7,458,807,781	7,943,687,781	484,880,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	314,259,940	289,159,940	-25,100,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	74,654,000	55,404,000	(19,250,000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	7,671,720	7,671,720	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,352,320	8,352,320	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	24,558,200	24,558,200	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,411,700	26,381,700	(3,030,000)
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	158,116,800	155,296,800	(2,820,000)
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,495,200	11,495,200	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4,588,314,409	4,768,314,409	180,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,442,503,309	4,532,503,309	90,000,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			90,000,000	90,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,823,200	10,823,200	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	121,975,000	121,975,000	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13,012,900	13,012,900	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	227,597,700	223,157,700	(4,440,000)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15,840,200	15,840,200	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	145,500,000	143,080,000	(2,420,000)
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25,457,500	23,437,500	(2,020,000)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	40,800,000	40,800,000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	30,112,896	220,252,896	190,140,000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			83,560,000	83,560,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,112,896	136,692,896	106,580,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	475,941,600	571,901,600	95,960,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17,919,800	17,919,800	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20,927,200	19,917,200	(1,010,000)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67,254,700	137,254,700	70,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	66,431,000	96,431,000	30,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	67,405,000	64,375,000	(3,030,000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212,804,400	212,804,400	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23,199,500	23,199,500	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	549,196,600	618,166,600	68,970,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39,651,600	110,641,600	70,990,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	445,000,000	445,000,000	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	64,545,000	62,525,000	(2,020,000)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801,789,876	787,789,876	(14,000,000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,300,000	3,300,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	623,124,661	570,094,661	(53,030,000)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,568,400	48,598,400	36,030,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	162,796,815	165,796,815	3,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	471,594,760	464,944,760	(6,650,000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	276,560,000	272,330,000	(4,230,000)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89,249,400	89,249,400	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	105,785,360	103,365,360	(2,420,000)
332	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	38,455,689,120	39,186,676,120	730,987,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	219,216,900	267,654,900	48,438,000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	86,465,000	83,245,000	(3,220,000)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132,751,900	184,409,900	51,658,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	68,795,000	66,775,000	-2,020,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68,795,000	66,775,000	(2,020,000)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	38,167,677,220	38,852,246,220	684,569,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	869,596,000	787,305,000	(82,291,000)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37,298,081,220	38,064,941,220	766,860,000
333	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif	5,137,270,884	4,743,385,884	-393,885,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	179,181,000	208,326,000	29,145,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	148,238,400	179,403,400	31,165,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,942,600	28,922,600	(2,020,000)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,958,089,884	4,535,059,884	-423,030,000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4,958,089,884	4,535,059,884	(423,030,000)
334	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	130,332,200	98,780,200	-31,552,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	130,332,200	98,780,200	-31,552,000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	130,332,200	98,780,200	(31,552,000)
335	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	193,440,500	383,010,500	189,570,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	193,440,500	383,010,500	189,570,000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	170,020,500	359,590,500	189,570,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23,420,000	23,420,000	-
			51,375,540,485	52,355,540,485	980,000,000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:



$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel : 2.8

Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	75	90.42	120.56	SANGAT BERHASIL	Realisasi dibagi dengan Target

Realisasi target kinerja Tujuan Renstra Kecamatan Muara Badak pada tahun 2025 yaitu sebesar 90.42. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja Sangat Berhasil Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tujuan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

a. Realisasi Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Target kinerja sasaran diambil dari indikator-indikator yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah pada tahun 2024. Dari Perjanjian Kinerja yang sudah menjadi tanggungjawab kelapa Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki 3 (Tiga) indikator yang menjadi satu sasaran utama Perangkat Daerah dan ini sudah tertuang didalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
2. Indikator Kinerja Tambahan memiliki 41 (Empat puluh satu) indikator dari 40 (Empat puluh) sasaran tambahan yang akan dicapai pada tahun 2024. Indikator Kinerja Tambahan dalam pelaksanaan anggaran setiap tahun dapat berubah-ubah sesuai dengan program kerja Kepala Daerah yang akan diintervensi oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Muara Badak atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2025 yang terdiri dari 41 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
A	Indikator Kinerja Utama							
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	A1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	80	100	125%	SANGAT BERHASIL
		A2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	78	100	128%	SANGAT BERHASIL
B	Indikator Kinerja Tambahan							
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0%	KURANG BERHASIL
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	89.1	101%	SANGAT BERHASIL
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
4	Matuntas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B4	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3.83	128%	SANGAT BERHASIL
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	B5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%	SANGAT BERHASIL
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	86	100%	SANGAT BERHASIL
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	B7	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100%	SANGAT BERHASIL



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65.59	85%	BERHASIL
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B10	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71.51	110%	SANGAT BERHASIL
							91%	BERHASIL

Berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026, pada tahun 2025 Kecamatan Muara Badak memiliki 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2025 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2024, Kecamatan Muara Badak memiliki 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Tambahan. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 10 Indikator, atau 83.3%;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 8.3%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 Indikator, atau 0%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 8.3%.

Adapun penjelasan capaian dari sasaran indikator kinerja utama Kecamatan Muara Badak pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1)Indikator Kinerja Utama A1 (Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti)

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-1” tahun 2025 yaitu 80% dan realisasinya sebesar 100%, sehingga capaian target kinerja tercapai sebesar 125% dengan predikat Sangat Berhasil. Dalam pencapaian



target ini tentunya juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, lalu perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten. Tentunya beberapa kendala ini dapat ditangani dengan adanya penambahan perangkat dari Instansi terkait sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal, hasil ini dapat diklaim berhasil atau tercapai oleh Kecamatan Muara Badak yaitu dengan tidak adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2025.

Tabel 3.0

Realisasi Indikator Sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
A	Indikator Kinerja Utama						
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	A1 Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	80	100	125%	SANGAT BERHASIL

2) Indikator Kinerja Utama A2 (Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-2” tahun 2025 yaitu 78% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja pada indikator ke-2 sebesar 128% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil ini diperoleh dari selama Tahun 2025 yang dilaporkan oleh bagian trantib terjadi beberapa kasus gangguan keamanan dan semua kasus bisa dimediasi dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan terselesaikan dengan baik ini dikarenakan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri. Adapun kendala yang cukup mengganggu yaitu kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib.



Tabel 3.1
Realisasi Indikator Sasaran Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan .	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	78	100	128

3)Indikator Kinerja Tambahan B1 (Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik)

Target kinerja indikator tambahan ke-1 tahun 2025 yaitu sebesar 100%, Untuk indikator ke-1 diperoleh realisasi sebesar 0% dengan kriteria penilaian Kurang Berhasil, Hasil ini diperoleh dari selama Tahun 2025 kegiatan Forum Konsultasi Publik keterlibatan Masyarakat Seperti Musrenbang Kecamatan yang tidak dilaporkan sesuai permintaan Pemerintah Dearah

4)Indikator Kinerja Tambahan B2 (Meningkatkan Kepuasan Masyarakat)

Target kinerja indikator ke-2 tahun 2025 yaitu sebesar 88.3%, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 89.1% dengan kriteria penilaian Sangat Berhasil. Hasil diperoleh dari Survei dan pengisian data di Aplikasi

5)Indikator Kinerja Tambahan B3 (Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Indikator kinerja tambahan ke-3 yaitu Tindak Lanjut Hasil Temuan adminstrasi dan kerugian BPK. Untuk tahun 2025 Kecamatan Muara Badak telah menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan



BPK atas LKPD seluruhnya terlaksana dan terealisasi sebesar 100%, tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil.

6) Indikator Kinerja Tambahan B4 (Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Target kinerja indikator tambahan ke-4 tahun 2025 yaitu sebesar 3, realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 3.83 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil diperoleh dari pengisian Kertas kerja untuk mendapatkan nilai Maturitas

7) Indikator Kinerja Tambahan B5 (Meningkatkan Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-5 yaitu Peningkatan Presetasi inovasi dikecamatan Muara Badak target yang ditetapkan yaitu sebesar 1 Kegiatan. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 100% dari target sebesar 1 inovasi sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil.

8) Indikator Kinerja Tambahan B6 (Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor)

Target kinerja indikator ke-6 tahun 2025 yaitu sebesar 100%, realisasi target yang tercapai yaitu sebesar 100% dengan kriteria penilaian Sangat Berhasil.

9) Indikator Kinerja Tambahan B7 (Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia)

Target kinerja indikator tambahan ke-7 pada tahun 2025 sebesar 100% yaitu realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 100% dengan kriteria penilaian Sangat Berhasil.

10) Indikator Kinerja Tambahan B8 (Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah)



Target kinerja indikator tambahan ke-8 pada tahun 2025 yaitu 48 Laporan, realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 48 dengan kriteria penilaian Sangat Berhasil.

11) Indikator Kinerja Tambahan B9 (Nilai SAKIP Kabupaten)

Indikator kinerja tambahan ke-9 yaitu Nilai SAKIP Kabupaten, target yang ditetapkan untuk nilai 77, dan realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 65.59 dari target yang ada dengan predikat Berhasil.

12) Indikator Kinerja Tambahan B13 (Indeks RB Kabupaten)

Indikator Kinerja tambahan ke-10 yaitu Indeks RB Kabupaten dengan target 65 realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 71,51 dari target yang ada dengan predikat Sangat Berhasil.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Target Indikator Tujuan Kecamatan Muara Badak yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel. Realisasi kinerja Tujuan Kantor Muara Badak tahun 2025 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan sebesar 89.1%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) dengan nilai indeks kepuasan sebesar 90.42%. Terjadi penurunan realisasi sebesar 1.32%. Akan tetapi jika dibandingkan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar 101% sedangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2024) sebesar 124%. Adapun faktor pendukung dan kendala yang dihadapi unit pelayanan Kantor Camat Muara Badak yaitu hal ini disebabkan unit pelayanan Kecamatan Muara Badak terus berbenah, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Tentunya dengan hasil yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang muncul pada saat pelayanan diberikan, hambatan yang sering terjadi yaitu hilangnya jaringan komunikasi dan internet yang ada serta SDM. Adapun perbandingan



realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	2022	71	80	Meningkat	113%
				2023	72	83.56	Meningkat	116%
				2024	72.7	90.42	Meningkat	124%
				2025	73	89.01	Meningkat	122%
				2026	74			

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja sasaran Kecamatan Camat Muara Badak tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya terjadi sedikit peningkatan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang menjadi target kinerja Kecamatan Muara Badak pada tahun 2024 ini dan ada juga 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja tambahan yang menjadi target tambahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (tahun 2024) secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			TAHUN 2024			TAHUN 2025		% Capaian
				Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	Realisasi	
A	Indikator Kinerja Utama									
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	A1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	90	100	111%	80	100	125%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

		A2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	100	125%	78	100	128%
B	Indikator Kinerja Tambahan									
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	100	0	0%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	72.7	90.42	124%	88.3	89.1	101%
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	100	100	100%
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B4	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	N/a	N/a	N/a	3	3.83	128%
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	B5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%	1	1	100%
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100%	100	100	100%
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	B7	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100%	100	100	100%
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	100	100	100	48	48	100%
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	73	65.92	90%	77	65.59	85%



10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B10	Indeks RB Kabupaten	Nilai	64	60.12	94%	65	71.51	110%
----	--	-----	---------------------	-------	----	-------	-----	----	-------	------

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja Kecamatan Muara Badak sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Kecamatan Muara Badak (Renstra PD) adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel : 3.4
Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
A	Indikator Kinerja Utama							
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	A1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	80	100	125%	SANGAT BERHASIL
		A2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	78	100	128%	SANGAT BERHASIL
B	Indikator Kinerja Tambahan							
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0%	KURANG BERHASIL
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	89.1	101%	SANGAT BERHASIL



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B4	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3.83	128%	SANGAT BERHASIL
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	B5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%	SANGAT BERHASIL
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	B7	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100%	SANGAT BERHASIL
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65.59	85%	BERHASIL
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B10	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71.51	110%	SANGAT BERHASIL
							91%	BERHASIL



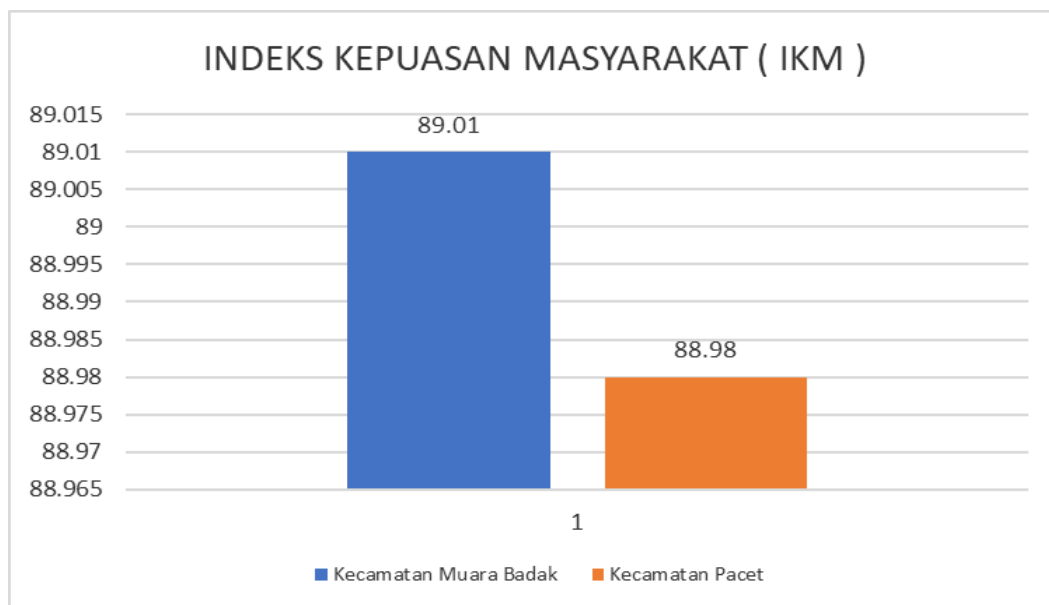
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Muara Badak (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.

Realisasi target kinerja Tujuan Kecamatan Muara Badak pada tahun 2025 yaitu sebesar 89.01. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja Sangat Berhasil, hasil ini tentunya masih ada kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Muara Badak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan nilai KM yang ada pada kecamatan lain di wilayah Indonesia untuk tahun 2025 yaitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung memperoleh nilai IKM sebesar 88.98 dengan predikat Sangat Berhasil. Link web Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

<https://kecamatanpacet.bandungkab.go.id/berita/capaian-nilai-indeks-kepuasan-masyarakat-kecamatan-pacet-tahun-2025>

Grafik 1.7

Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Muara badak Dengan Kecamatan Lain Tahun 2025



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang



disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan Bupati tentunya ada faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan tidak terealisasinya target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan menurunnya kinerja perangkat daerah yang ada. Pada tahun 2024 ada beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel : 3.5
Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
A	Indikator Kinerja Utama							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	80	100	125%	Ada Penambahan Perangkat Dari Instansi Terkait	Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten, serta apabila Listrik/PLN padam jaringan internet juga padam
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	78	100	128%	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri.	Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib
B	Indikator Kinerja Tambahan							
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0%	FKP yaitu musrenbang Tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan RKPD Kecamatan	tidak menyampaikan data kegiatan kepada Ortal Kabupaten
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	89.1	101%	Kegiatan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik	Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten, serta apabila Listrik/PLN padam jaringan internet juga padam



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100%	dukungan pimpinan dan arahannya kepada bawahannya untuk selalu menjalankan pekerjaan dengan baik	masih kurangnya SDM dan ASN yang ada
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3.83	128%	Laporan Maturitas SPIP pada perangkat Daerah	masih kurangnya SDM dan ASN yang ada
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%		
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	86	100%		
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100%	dukungan pimpinan dan arahannya kepada bawahannya untuk selalu menjalankan pekerjaan dengan baik	masih kurangnya SDM dan ASN yang ada
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100%		
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71.51	110%		

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran dengan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.



Hasil analisis persentase rata-rata capaian sasaran indikator kinerja utama dan sasaran indikator kinerja tambahan dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.6

Rincian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Tahun 2025

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi %	Ket.
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	125%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	39,186,676,120	28,864,409,017	73.66	Efisien
2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	128%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	98,780,200	68,073,300	68.91	Efisien
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	0%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4,743,385,884	3,934,564,950	82.95	Efisien
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	103.29%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,943,687,781	6,660,676,426	83.85	Efisien
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah						
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor						
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia						
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani						
11	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	383,010,500	320,237,000	83.61	Efisien



7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.7

Analisis Program /Kegiatan Pencapaian Pernyataan Kinerja 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Satuan	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100%	SOP Tersedia	Rusaknya Peralatan Pendukung (Seperti Alat Perekaman E-KTP) Yang Memerlukan Perbaikan Cukup Lama Sehingga Menghambat Dalam Proses Pelayanan
		Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100%	Koordinasi Forkopimcam Dengan Pihak Swasta dan Instansi Terkait Terlaksana Dengan Baik Sehingga Proses Perbaikan Jalan Yang Rusak Dapat Segera Diperbaiki	Rusaknya Jalan Akibat Bencana Alam (Banjir) Sehingga Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Menurun
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif	Persen	78.	78	100%	Tingkat Antusias Warga Yang Cukup Tinggi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih Kurangnya Sosialisasi Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari Instansi Terkait
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	76.18	102.95 %	Data Realisasi dan Pendukung Yang Dibutuhkan Dalam Pelaporan Tersedia	Kurangnya Pengarsipan Berkas Secara Berkala, Sehingga Ada Beberapa Data Dukung Yang Diminta Tidak Dapat Dipenuhi
4	Program Koordinasi Kententrman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentrman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta	Persen	81	81	100%	Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Sesuai Jadwal	Tidak Ada
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	74	74	100%	Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Sesuai Jadwal	Tidak Ada



B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ada pada Kecamatan Muara Badak dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 76.11 %, dari pagu sebesar Rp.52.355.540.485,- dan terealisasi sebesar Rp.39.847.960.693,- yang terdiri dari 4 (Empat) Program. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 dengan Pagu Rp. 40.913.488.700.- dan Realisasi anggaran sebesar Rp.39.896.066.526.- atau 96.13 % yang berarti mengalami penurunan sebesar 20.02 %, penyebabnya kondisi Keuangan Daerah terjadinya utang sebesar Rp. 9.611.059.952 (LHR Utang Inspektorat Daerah Kab Kutai Kartanegara Nomor : B-006/Itda/IP.III/700.1/1/2026 tertanggal 30 Januari 2026) Adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel : 3.8

Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Setelah Perubahan Tahun 2025		Realisasi Target		% Capaian	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	7,943,687,781	76.18	6,660,676,426	76.18	83.85
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	289,159,940	11	64,967,438	100.00	22.47
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3	55,404,000	3	15,953,000	100.00	28.79
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1	7,671,720	1	3,615,000	100	47.12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	8,352,320	1	-	100	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3	24,558,200	3	5,435,000	100.00	22.13
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	26,381,700	1	4,265,000	100	16.17
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	155,296,800	1	35,699,438	100	22.99
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	11,495,200	1	-	100	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4	4,768,314,409	4	4,227,295,048	100.00	88.65



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	314	4,532,503,309	314	4,002,288,048	100.00	88.30
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	90,000,000	1	90,000,000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10,823,200	1	2,279,000	100.00	21.06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	121,975,000	1	121,975,000	100.00	100.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	13,012,900	1	10,753,000	100.00	82.63
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4	223,157,700	4	171,145,935	100.00	76.69
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	15,840,200	1	9,543,000	100.00	60.25
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1	143,080,000	1	134,071,935	100.00	93.70
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	23,437,500	1	5,931,000	100.00	25.31
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1	40,800,000	1	21,600,000	100.00	52.94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	2	220,252,896	2	92,762,000	100.00	42.12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		40	83,560,000	40	83,560,000	100.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26	136,692,896	26	9,202,000	100.00	6.73
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	90	571,901,600	90	478,573,963	100.00	83.68
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	17,919,800	1	17,618,480	100.00	98.32
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	19,917,200	1	15,954,000	100.00	80.10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	137,254,700	1	101,070,000	100.00	73.64
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	96,431,000	1	87,793,080	100.00	91.04
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	64,375,000	1	43,097,301	100.00	66.95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	212,804,400	1	207,541,102	100.00	97.53
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	23,199,500	1	5,500,000	100.00	23.71
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	-	0	-	0.00	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	508	618,166,600	507	547,806,582	99.80	88.62
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	504	110,641,600	504	109,133,940	100.00	98.64
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	445,000,000	1	427,239,842	100.00	96.01



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	62,525,000	2	11,432,800	66.67	18.29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	787,789,876	90	639,306,840	100.00	81.15
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3,300,000	1	3,300,000	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	570,094,661	12	433,868,777	100.00	76.10
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	48,598,400	1	48,500,000	100.00	99.80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	165,796,815	12	153,638,063	100.00	92.67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	32	464,944,760	32	438,818,620	100.00	94.38
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	272,330,000	11	255,811,635	100.00	93.93
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	89,249,400	20	88,430,000	100.00	99.08
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	103,365,360	1	94,576,985	100.00	91.50
332	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	39,186,676,120	100	28,864,409,017	100	73.66
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	267,654,900	3	212,431,000	100.00	79.37
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	83,245,000	2	49,299,000	100.00	59.22
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	184,409,900	1	163,132,000	100.00	88.46
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	80	66,775,000	80	44,075,000	100.00	66.01
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	66,775,000	2	44,075,000	100.00	66.01
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	208	38,852,246,220	143	28,607,903,017	68.75	73.63
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4	787,305,000	3	633,993,425	75.00	80.53
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	204	38,064,941,220	140	27,973,909,592	68.63	73.49
333	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif	78	4,743,385,884	78	3,934,564,950	100.00	82.95



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2025

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	67	208,326,000	67	158,274,000	100.00	75.97
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65	179,403,400	65	139,794,000	100.00	77.92
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	28,922,600	2	18,480,000	100.00	63.89
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6	4,535,059,884	6	3,776,290,950	100.00	83.27
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	4,535,059,884	6	3,776,290,950	100.00	83.27
334	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	81	98,780,200	81	68,073,300	100.00	68.91
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76	98,780,200	76	68,073,300	100.00	68.91
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	98,780,200	2	68,073,300	100.00	68.91
335	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74	383,010,500	74	320,237,000	100.00	83.61
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2	383,010,500	2	320,237,000	100.00	83.61
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	359,590,500	100	302,437,000	100.00	84.11
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	23,420,000	1	17,800,000	100.00	76.00
				52,355,540,485		39,847,960,693		76.11



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak tahun 2025 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Muara Badak pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026. Kecamatan Muara Badak telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 dapat tercapai melebihi target yang sudah ada, hasil capaian per-indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Indikator Kinerja Utama

- a) Capaian Kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan diperoleh sebesar 122 % (Sangat Berhasil) dari target Nilai 73 dan diperoleh nilai 89.01%

2. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama

- a) Capaian kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti memperoleh nilai 125% (Sangat Berhasil)
- b) Capaian kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 128% (Sangat Berhasil)

3. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tambahan

- a) Capaian Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sebesar 0% (Kurang Berhasil).
- b) Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 101% (Sangat Berhasil).
- c) Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD



Tahun sebelumnya sebesar 100% (Sangat Berhasil).

- d) Capaian Kinerja Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah sebesar 128% (Sangat Berhasil).
- e) Capaian Kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Berhasil).
- f) Capaian Kinerja Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor sebesar 100% (Sangat Berhasil).
- g) Capaian Kinerja Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia Sebesar 100% (Sangat Berhasil).
- h) Capaian Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" sebesar 100% (Sangat Berhasil)
- i) Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 85% (Berhasil).
- j) Capaian Kinerja Indeks RB Kabupaten sebesar 110% (Sangat Berhasil).


Muara Badak
ARPAN, S.Sos
NIP. 196806121988031007